



Prinsip-Prinsip Islam tentang Diplomasi Wisata Halal di Indonesia

Agus Nilmada Azmi¹, Fajrin Putra Wijaya², Ahmad Ali Fikri³

^{1,2,3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

¹ agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id, ² fajrin.wijaya20@mhs.uinjkt.ac.id,

³ fikrieahmed@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini membahas tentang prinsip-prinsip wisata dalam Islam dan perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Prinsip-prinsip wisata dalam tulisan ini dielaborasi berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat penjelasan tentang wisata. Sementara untuk menganalisis perkembangan wisata halal di Indonesia, tulisan ini secara spesifik akan memotret IMT-GT, dengan teori pendekatan Neo Liberal Institutional, Soft Power dan kerja sama growth triangle. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata dalam Islam diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui kerja sama IMT-GT, Indonesia turut aktif dalam berdiplomasi dan mengupayakan meningkatkan pariwisata halal dalam bentuk forum dialog kerja sama sebagai acuan dalam merumuskan kerja sama IMT-GT. Upaya ini sesuai dengan nilai kerja sama IMT-GT sekaligus sesuai dengan ciri khas diplomasi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip bebas dan aktif, yaitu dialog dan komunikasi dalam berdiplomasi.

Kata kunci: *Pariwisata Halal, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*

Abstract:

This article discusses the principles of tourism in Islam and the development of halal tourism in Indonesia. The principles of tourism in this article are elaborated based on verses from the Koran which contain explanations about tourism. Meanwhile, to analyze the development of halal tourism in Indonesia, this article will specifically outlines IMT-GT, with the theory of the Neo Liberal Institutional, Soft Power and growth triangle approaches. This research shows that tourism activities in Islam are permitted as long as they do not conflict with Islamic values. Through IMT-GT cooperation, Indonesia is actively involved in diplomacy and seeks to increase halal tourism in the form of a cooperative dialogue forum as a reference in formulating IMT-GT cooperation. This effort is in accordance with the values of IMT-GT cooperation as well as in accordance with the characteristics of Indonesian diplomacy which is based on free and active principles, namely dialogue and communication in diplomacy.

Keywords: *Halal Tourism, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*

Pendahuluan

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan industri halal semakin meningkat adalah pengetahuan dan kesadaran akan produk halal.¹ Fenomena industri ini kemudian melahirkan fenomena baru berikutnya, yakni apa yang dikenal hari ini sebagai wisata halal (*halal tourism*).² Selain itu, terdapat berbagai literatur yang menjelaskan bahwa wisatawan muslim peduli terhadap konsumsi produk dan layanan sesuai syariah ketika berkunjung ke tempat wisata.³

Dalam satu dekade terakhir, minat para wisatawan terhadap wisata halal (*halal tourism*) terus mengalami pertumbuhan. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim dari tahun ke tahun.⁴ Menurut data GMTI (*Global Muslim Travel Index*), pada tahun 2022 terdapat 110 juta pengunjung muslim internasional atau 12% dari seluruh kedatangan internasional. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang cukup besar, setara 68% dari tingkat kedatangan wisatawan muslim sebelum pandemi pada tahun 2019. Bahkan kedatangan wisatawan muslim meningkat menjadi 140 juta pada tahun 2023 dan pulih ke tingkat sebelum pandemi sebesar 160 juta pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah wisatawan muslim diperkirakan akan mencapai 230 juta pada tahun 2028, dengan perkiraan pengeluaran sebesar USD 225 Miliar. Untuk mengeksplorasi potensi besar pariwisata halal tersebut, banyak negara (baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim) mulai menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Namun, masih banyak para pelaku bisnis dan pihak yang terlibat di sektor pariwisata terkendala dalam pemahaman (baik produk, fasilitas maupun infrastruktur) dari wisata halal tersebut.⁵

Indonesia sendiri memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Tak hanya memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tersebar di seluruh Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki beraneka kebudayaan, bahasa dan kearifan lokal yang begitu menarik untuk dilirik. Dengan ditetapkannya pariwisata sebagai sektor pembuka yang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2014 menyatakan bahwa industri pariwisata mengalami kenaikan yang

¹ Lihat Rozailin Abdul Rahman *et al*, "Malaysia as Global Halal Hub: OIC Food Manufacturers' Perspective", *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25 (sup1), 154-166. Bandingkan dengan H. Hamdan, *et al*, "Purchasing Decisions among Muslim Consumers of Processed Halal Food Products" *Journal of Food Products Marketing*, 19 (1) 2013: 54-61.

² Z. Samori, *et al*, "Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries" *Tourism Management Perspective*, 19, 2016: 131-136.

³ M. Battour & MN. Ismail, "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future" *Tourism Management Perspective*, 19 (2016): 150-154. Lihat juga J. Jafari & N. Scott, "Muslim World and its Tourism" *Annals of Tourism Research*, 44 (2014): 1-19.

⁴ Bhuiyan *et al*, "Potentials of Islamic Tourism: A Case Study of Malaysia on East Coast Economic Region" *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(6): 1333-1340. Yusof & N. Shutto, "The Development of Halal Food Market in Japan: An Exploratory Study" *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121 (2014): 253-261. H. El-Gohary, "Halal Tourism, is it Really Halal?" *Tourism Management Perspective*, 19 (2016): 124-130

⁵ A. Mohsin *et al*, "Halal Tourism: Emerging Opportunities" *Tourism Management Perspective* 19 (2016): 137-143. Lihat juga H. Han *et al*, "Exploring Halal-Friendly Destination Attributes in South Korea: Perceptions and Behaviors of Muslim Travelers toward a Non-Muslim Destination" *Tourism Management*, 71 (2018): 151-164.

signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ekspor barang dan jasa mengalami kenaikan, semula 10% menjadi 17% dan menjadi penyumbang terbesar sehingga melesat pada peringkat 4 dan meraih devisa sebesar 10 miliar USD.

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia sejalan dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global.⁶ Pariwisata di dunia dalam tujuh tahun terakhir telah dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan antar negara dan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik. Total wisatawan dunia pada tahun 2014 yang mencapai 1.110 juta perjalanan ke luar negeri atau meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut juga lebih dari 300 juta melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya Asia Tenggara.

Saat ini negara Indonesia sudah menjadi bagian dari beberapa negara yang cukup maju dalam mengembangkan konsep pariwisata halal. Indonesia tercatat telah mengalami kemajuan urutan yang sangat spesifik pada bagan urutan GMTI (*Global Muslim Travel Index*). Indonesia menempati urutan ke-6 pada tahun 2015, serta melonjak pada empat tahun belakang ini. Hingga sampai tahun 2019, Indonesia memegang urutan pertama dengan total seluruh skor 78. Posisi puncak ini masih dipertahankan oleh Indonesia hingga tahun 2023 dengan skor 73.⁷

Menurut Ismanto, meningkatnya antusias wisatawan muslim terhadap pariwisata halal juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Saat ini, kegiatan wisata bagi masyarakat merupakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Saat ini masyarakat melaksanakan aktivitas pariwisata setelah mendapatkan kebutuhan pokok seperti aktivitas makan, belanja serta tempat tinggal yang sudah tercukupi.⁸ Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim akan memberi kesempatan dalam meningkatkan jumlah wisatawan muslim di Indonesia. Demikian pula peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara juga akan memberikan peluang bagi pelaku usaha pariwisata dengan konsep Islami.⁹

Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara mana pun. Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan muslim merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Berdasarkan hal itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, konsep, peluang, dan tantangan wisata halal (*halal tourism*) di Indonesia dengan menjadikan kerjasama yang dibangun antara Malaysia dan Thailand, yang dikenal dengan *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) TAHUN 2019, sebagai lensa penelitian ini.

⁶ Z. Samori, *et al.*, “Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries” *Tourism Management Perspective*, 19, 2016: 131-136.

⁷ Master Card and Crescent Rating, “Global Muslim Travel Index 2023”. Diakses November 2023 pada https://www.crescentrating.com/download/thankyou.html?file=iyPeNNH_GMTI_2023_Report_-_Final_Version_-_1st_June.pdf

⁸ K. Ismanto *et al.*, “Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective” *HIKMATUNA*, 6(2), (2021), 103–114.

⁹ A. M. Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), (2017), 65–79.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif; prosedur penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis maupun gambar melalui langkah-langkah analisis data yang unik dan mampu menggambarkan desain-desain yang berbeda,¹⁰ atau sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang maupun perilaku yang dapat diamati.¹¹ Penelitian ini bermaksud memahami secara holistik dan kemudian mendeskripsikan tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Adapun metode yang digunakan adalah *grounded research*, yakni prosedur sistematis dalam penelitian kualitatif dengan maksud menghasilkan teori yang menjelaskan proses, tindakan, atau interaksi tentang topik yang substantif pada tingkat konseptual yang luas. Pengumpulan data, analisis, dan teori saling memiliki hubungan timbal balik antar sesama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Melalui teknik ini, semua informasi yang tersebar luas di banyak literatur itu akan diperlakukan secara setara untuk kemudian dilakukan klasifikasi, determinasi, investigasi, dan komparasi antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Selanjutnya, dalam menganalisis *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) TAHUN 2019, sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mengembangkan wisata halal, penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan atau teori. *Pertama*, teori neo liberal institusional. Teori ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1977 oleh Robert Owen Keohane melalui tulisannya yang berjudul *Power and Interdependence*. Neo Liberal Institusional meyakini bahwa kerja sama yang baik dan berkelanjutan antar negara di dunia dapat diciptakan melalui institusi internasional.¹² Kerja sama yang dilakukan negara dalam institusi akhirnya menjadi saling ketergantungan yang membuat tindakan salah satu aktor akan berakibat pada aktor lainnya.¹³ Dalam hal ini, institusi juga mencakup praktik sosial yang terdiri atas sekelompok aturan konvensi yang mengatur hubungan antar aktor untuk berbagi informasi, mengurangi biaya, komitmen yang lebih kredibel, fokus untuk koordinasi, serta adanya timbal balik¹⁴ serta berfungsi sebagai wadah dalam membangun solusi bagi destabilisasi dari anarki internasional tersebut.¹⁵ Teori ini diadopsi dalam penelitian ini untuk menganalisis IMT-GT sebagai

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publications, Inc, 2014), hal. 183

¹¹ Lihat misalnya Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 3.

¹² Keohane, R. O. (1989). *Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics* (1st ed.).

¹³ Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2015). Power and interdependence. *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*, 41(4)

¹⁴ Jönsson, C., & Hall, M. (2005). Essence of Diplomacy. In *Essence of Diplomacy* (Issue February). Lihat juga Robert, Keohane and Martin, L. (2009). The Promise of Institutional Theory Author (s), *International Security*, 20(1), 39–51.

¹⁵ A. Simon, et al.,. Left Ventricle Motion Estimation in Computed Tomography Imaging. *Multi-Modality Cardiac Imaging: Processing and Analysis*, (2015), 257–292. Pandangan Neo Liberal Institusional tentang hubungan antar negara tersebut pada akhirnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Neo Realis, melainkan saling melengkapi. Lihat A. Whyte, (2012). Neorealism and Neoliberal Institutionalism: Born of the Same Approach? *E-International Relations*, 1–8.

institusi yang mendorong negara anggotanya untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan pariwisata halal.

Kedua, konsep kerja sama *growth triangle*. Istilah segitiga pertumbuhan atau *growth triangle* pertama kali dikenalkan oleh Wakil Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong untuk menggambarkan kerja sama SIJORI (Singapura, Johor, Malaysia).¹⁶ Kerja sama *growth triangle* atau segitiga pertumbuhan dimaksudkan untuk mempercepat kerja sama dan integrasi ekonomi dengan faktor pendukung seperti komplementari ekonomi, kedekatan geografis, komitmen politik dan koordinasi kebijakan, dan pembangunan infrastruktur, kedekatan letak, kesamaan secara sejarah, budaya, sumber daya, iklim, dan sosial, serta tentu kesamaan kepentingan.¹⁷ Dalam penelitian ini, konsep *growth triangle* diaplikasikan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai nilai institusi IMT-GT yang mendorong negara anggotanya untuk saling bekerja sama sesuai nilai dan tujuan dalam konsep *growth triangle*.

Ketiga, teori *soft power* yang digunakan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Indonesia dalam mempengaruhi negara atau aktor lain untuk meningkatkan pariwisata halal. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Joseph Samuel Nye Jr. pada tahun 1990. Nye menjelaskan bahwa *soft power* adalah cara negara untuk mencapai tujuan tanpa kekerasan seperti penggunaan militer, embargo, atau sanksi dan kecaman. Namun Nye mencoba melakukan penyegaran dengan menyatakan bahwa *soft power* adalah cara negara mencapai tujuannya dengan mempengaruhi negara lain melalui kerja sama dalam agenda positif yang menghasilkan. Artinya, ini mendorong negara untuk melakukan kerja sama dengan sukarela dan menghasilkan hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Negara menggunakan sumber daya nasionalnya yang unggul sebagai daya tarik atau *attraction* melalui instrumen kebijakan luar negeri untuk mempengaruhi negara lain agar tercapainya kepentingan negara.¹⁸

Kebudayaan, nilai politis, dan kebijakan negara merupakan sumber utama *soft power*. Penggunaan *soft power* harus dapat menyebar dan mendalam. Terdapat 2 (dua) kategori aktor dalam keterlibatan membentuk *soft power*, seperti yang dijelaskan oleh Nye sebagai berikut:

¹⁶ Yusnarida Eka Nizmi, Memahami Kompleksitas Growth Triangles, *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (2019), 233-248

¹⁷ Holsti, K. J. (1988). *International Politics: A Framework for Analysis*. Erlangga. Bangingkan dengan Min Tang, & Myo Thant. (1994). Growth triangles: conceptual issues and operational problems. In *Economics Staff Paper - Asian Development Bank, Economics & Development Resource Center* (Vol. 54). Rudiany, N. P., & Anugrah, P. T. (2020). Potensi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) Sebagai Stumblinh Block terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2(1), 114–141. Nizmi, Memahami Kompleksitas Growth Triangles, *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (2019), 233-248

¹⁸ Nye, J. S. (2008). Public Diploacy and Soft Power. *Tha Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. Trunkos, J. (2013). *What Is Soft Power Capability and How Does It Impact Foreign Policy ?* (p. 13).

Tabel 1.1 Kategori Aktor dalam Membentuk *Soft Power*

Sumber <i>Soft Power</i>	<i>Referees/Rujukan</i> untuk kredibilitas dan legitimasi <i>Soft Power</i>	<i>Receivers/Penerima Soft Power</i>
Kebijakan luar negeri	Media, organisasi non pemerintah, (<i>Non Governmental Organization/NGOs</i>), organisasi antar pemerintah (<i>Intergovernmental Organization/IGOs</i>)	Pemerintah dan publik/masyarakat negara lain
Nilai-nilai dan kebijakan domestik	Media, NGOs, IGOs	Pemerintah dan publik/masyarakat negara lain
<i>High Culture</i>	Pemerintah, NGOs, IGOs	Pemerintah dan publik/masyarakat negara lain
<i>Pop Culture</i>	Media, pasar (<i>markets</i>)	Publik/masyarakat negara lain

Hasil dan Diskusi

1. Prinsip-prinsip Umum Wisata dalam Islam dan Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Dalam pandangan Islam, aktivitas wisata memiliki anjuran untuk mengajak wisatawan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Swt. dan juga menyampaikan ajaran Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. kepada seluruh umat manusia.¹⁹ Hal ini juga menjadi misi para rasul dan para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad saw. menyampaikan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak umat manusia untuk menjalankan kebenaran. Definisi pariwisata menurut perspektif Islam diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditentukan syariah Islam. Oleh karena itu, jika Al-Qur'an dan Hadis sudah menjadi dasar dalam menerapkan pariwisata, maka hal inilah yang disebut dengan konsep pariwisata halal.²⁰

Sementara itu, jika pariwisata halal dipahami sebagai kegiatan wisata dengan tidak melanggar aturan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut justru dianjurkan dalam Islam sebagaimana terkandung dalam Q.S. Yusuf:

¹⁹ A. Imron, (2018). *Studi tentang Motivasi Peziarah di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak: Perspektif Dakwah*. UIN Walisongo Semarang.

²⁰ W. N. M. Fisol, et al (2019). Islamic Tourism Development Based On the Scientific of the Maqasid Shariah Framework. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 9(5), 784–795.

109 yang menyatakan bahwa setiap muslim hendaknya melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, sehingga ayat ini erat hubungannya dengan perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Swt. dengan kunjungan ke negara lainnya dalam konteks pariwisata halal.²¹

Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga, Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman yakni nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya. Hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata.²²

Hingga kini, belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan memaparkan hal tersebut.²³ Menurut Henderson dan Battour, prinsip-prinsip umum wisata halal mencakup beberapa hal, yakni makanan halal, tidak ada minuman keras (mengandung alkohol), tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita, hiburan yang sesuai, fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender, pakaian islami untuk seragam staf, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (salat) di kamar, petunjuk kiblat, seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia, toilet diposisikan tidak menghadap kiblat, keuangan Syariah, tempat penginapan (*guest house* atau hotel) tidak boleh untuk tamu yang tidak bersama mahram-nya (pasangan yang belum menikah), hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat.²⁴

Pariwisata yang ada dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perjalanan dengan tujuan yang mulia, di antaranya; 1) mengaitkan wisata ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun agama yakni haji pada bulan-bulan tertentu, yakni umrah ke Baitullah dalam setahun. 2) wisata dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu walaupun satu hadis. 3) Wisata tidak hanya untuk menghibur diri, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.²⁵

Istilah *halal tourism* atau pariwisata halal mulai berkembang saat pagelaran *World Halal Tourism Summit* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tahun 2015.²⁶ Pariwisata halal memiliki basis budaya dan ajaran Islam dalam pelaksanaannya yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berhubungan dengan

²¹ S. Nasution, "Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara" *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2) (2021), Art. 2.

²² Chookaew, et al., 2015. Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economic, Business and Management*. 3(7): 739-741.

²³ H. El-Gohary, 2016. Halal Tourism, is it Really Halal? *Tourism Management Perspective*. 19: 124-130.

²⁴ Henderson, JC. (2016). Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insight from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspective*. 19: 160-164. Battour, M., Ismail, MN, dan Battour, M. 2010. Toward a Halal Tourism Market. *Tourism Analysis*. 15(4): 461-470.

²⁵ Fatkurrohman. (2018). Wisata Halal dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis – Wisata Halal. <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>

²⁶ Andriani, et al. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015.

hukum syariat Islam.²⁷ Pariwisata halal menekankan pada penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat atau ajaran dalam agama Islam.²⁸ Pariwisata halal sendiri memiliki beberapa tujuan seperti menyatukan keberagaman, pelestarian budaya dan sejarah, serta peningkatan wawasan dan edukasi.²⁹

Terdapat 4 (empat) kriteria penilaian dalam standarisasi pariwisata halal. *Pertama*, aspek akses seperti kemudahan visa, konektivitas, dan infrastruktur serta transportasi. *Kedua*, aspek komunikasi seperti jangkauan jaringan, kemudahan komunikasi, dan jejak digital. *Ketiga*, aspek lingkungan seperti keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, keramahan, serta kondisi lingkungan. *Keempat*, aspek jasa seperti tersedianya kebutuhan utama, jasa utama, dan pengalaman berharga yang tentu saja semuanya sesuai dengan syariat Islam. Keempat aspek tersebut juga sama digunakan oleh lembaga *Indonesia Muslim Travel Index*.

Pariwisata dalam bahasa arab dikenal dengan “*al-Rihlah*” dan “*al-Safar*”, sementara di dalam bahasa Inggris dikenal dengan *tourism*.³⁰ Secara definisi, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanannya berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut dan tujuannya untuk bersenang-senang, melakukan aktivitas bisnis dan lain sebagainya.³¹ Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata mempunyai pengertian bepergian atau melancong untuk bersenang-senang. Dengan adanya pariwisata, dapat membantu salah satu pendapatan nasional yang ada di Indonesia.³² Namun, untuk menjadikan daerah menjadi tempat pariwisata, pada umumnya harus memenuhi beberapa elemen dan unsur-unsur daerah sebagai kategori pariwisata.

Elemen dari daerah yang bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata, di antaranya; 1) wisatawan, 2) elemen geografi dengan tiga area seperti daerah asal wisatawan, daerah transit, daerah tujuan wisata, industri pariwisata; 3) industri pariwisata yang menyediakan jasa, daya tarik dan sarana wisata. Sementara, unsur-unsur pariwisata terdiri dari; jenis aktivitas yang dilakukan dan maksud tujuan dari kunjungan, lokasi kegiatan wisata yang dituju, akses yang bisa ditempuh, rencana lamanya tinggal di daerah wisata dan sarana prasarana serta fasilitas yang disediakan.³³ Unsur maupun kategori sekaligus tempat tersebut yang nantinya dijadikan sebagai pariwisata tidak terlepas dari daya tarik dan keunikan tersendiri tergantung dari daerah yang bersangkutan, misalnya pariwisata religi dan nama-nama lainnya sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang dialami manusia saat ini.

²⁷ Azzam, M S, M A Abdullah and D B Razak. "Halal Tourism Definition Justification and Scope towards Sustainable Development. ." *International Journal of Business, Economics and Law* (2019): 21-31.

²⁸ Mohsin, A, N Ramli and B A Alkhulayfi. "Halal Tourism: Emerging Opportunities." *Tourism Management Perspectives* (2016): 137-143.

²⁹ Surur, Fadhil. *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

³⁰ Arifin, J. (2016). Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Pariwisata. *Jurnal An-Nur*, 4(2), Art. 2.

³¹ Banjarnahor, dkk. (2021). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.

³² Widagdyo, K. G. (2015). Analisis pasar pariwisata halal indonesia. *Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.

³³ Luturlean, B. S. (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata. Humaniora*

Konsep wisata halal muncul ketika masyarakat melakukan ziarah ke masjid, makam orang-orang saleh atau dikenal sebagai ulama, syekh dan lainnya sehingga ziarah tersebut dikenal sebagai ziarah religi. Kemudian, pada tahun 2007 telah dilaksanakan konferensi di Cordova, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) dengan judul “*International Conference On Tourism, Religions and Dialogue of Cultures*”. Konferensi ini dilakukan terkait dengan pentingnya wisata halal kepada masyarakat atau turis asing yang ingin berkunjung ke wilayah, lebih-lebih masyarakatnya mayoritas muslim, sehingga konferensi ini menekankan kepada; 1) kebutuhan untuk mengembangkan hubungan dinamis antara nilai-nilai warisan agama dan budaya untuk melayani kepentingan penduduk, wisatawan dan komunitas agama; 2) pentingnya untuk menjaga keaslian dari situs-situs keagamaan dan rute-rute budaya; 3) pentingnya penyebaran informasi tentang warisan budaya tak berwujud dan tradisi kuno yang bertujuan untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan nilai-nilai dan spiritualitas komunitas tuan rumah.³⁴ Ketika konsep pariwisata halal telah dilaksanakan, maka dalam bidang lainnya yang menunjang proses pariwisata semakin dikembangkan di setiap daerah agar masyarakat yang ingin berkunjung dapat menikmati sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya.

Bidang-bidang lain sebagai penunjang pariwisata halal yang semakin dikembangkan yakni terkait dengan bidang kuliner, keuangan, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, oleh-oleh dan lainnya. Di negara berkembang juga, pariwisata halal ikut juga berkembang dengan program dan nama-nama yang berbeda seperti *Islam tourism, halal friendly tourism destination, halal travel, muslim friendly travel destinations, halal lifestyle* dan lain sebagainya.³⁵ Hampir semua konsep ini telah dipakai di berbagai negara yang tidak terkecuali juga di Indonesia, lebih-lebih lagi komunitas Islam semakin besar dan berkembang. Tempat-tempat penginapan untuk pariwisata misalnya hotel, *home stay*, dan tempat lainnya ikut digagas berbasis syariah.

Hotel berbasis halal dengan simbol atau logo sertifikat halal sehingga segala-galanya berbasis syariah, baik dari pekerja, staf, pakaian dan peraturan lainnya.³⁶ Sertifikasi usaha hotel syariah mencakup pada tiga hal; memiliki sertifikat standar usaha hotel, memiliki penilaian mandiri usaha hotel syariah dan persiapan sistem jaminan halal (SJH), dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran. Untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah, maka pihak pemilik usaha pariwisata melakukan berbagai macam cara; *Pertama*, melakukan pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi kepada DSN-MUI, lalu DSN-MUI melimpahkan audit sistem jaminan halal kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit sistem jaminan halal. *Kedua*, apabila audit sistem jaminan halal tidak lengkap dan dinyatakan tidak lulus maka sebagai pengusul harus melengkapinya, sehingga menjadi lengkap dan bisa dijadikan hotel berbasis syariah.³⁷ Segala pelaksanaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata halal, maka sarana dan prasarana diubah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

³⁴ J. A. Gliner, *et al*, (2011). *Research Methods in Applied Settings: An Integrated Approach to Design And Analysis*. Routledge.

³⁵ Abrori, F. (2021). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara. Asian Development Bank. (2013). *Food Security in Asia and the Pacific*.

³⁶ Kusumaningtyas, *et al* (2021). Halal Friendly Tourism in a non-Muslim country: Observation Study in Nepal: *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), Art. 1.

³⁷ Huda, *et al* (2021). *Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*. Prenada Media.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan wisata halal di Indonesia dengan melakukan beberapa tahapan, di antaranya; sistem informasi digital, daya Tarik dan paket wisata halal, sertifikasi dan standarisasi, muslim *visitor guide*, penguatan pemahaman pariwisata halal, pengembangan dan riset, Indonesian Muslim Travel Index (TMTI) *monitoring* dan evaluasi, *marketing outreach*, regulasi pariwisata halal dan *monitoring* dan evaluasi DSRA (Desain, Strategi, Rencana dan aksi). Dengan demikian, pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu memerhatikan; 1) percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal; 2) adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara lembaga yang menaungi aturan untuk sertifikasi dan standarisasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata. 3) persiapan hal-hal lain di samping percepatan regulasi pariwisata halal tersebut.³⁸

2. Analisis Kerja sama IMT-GT sebagai Upaya Pemerintah Indonesia mengembangkan Wisata Halal

Kerja sama IMT-GT mulanya diprakarsai atas ide dan gagasan dari Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun. Dr. Mahathir Mohammad. Inisiasi Tun Mahathir tersebut berjalan dengan diawali pertemuan Presiden Indonesia saat itu, Jenderal TNI (Purn) H. M. Soeharto, Perdana Menteri Thailand saat itu, Chuan Leekpai, dan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tuan. Dr. Mahathir Mohammad di Langkawi, Malaysia pada tahun 1993. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan atas berdirinya IMT-GT. Ketiga pemimpin negara tersebut berkomitmen melalui terbentuknya IMT-GT agar terciptanya kerangka kerja sama yang mendorong integrasi perekonomian di masing-masing provinsi yang masuk dalam kawasan segitiga yang berdekatan antar ketiga negara.³⁹

Berdasarkan visinya, IMT-GT ingin menciptakan sebuah kondisi sub kawasan yang berjalan dengan lancar dan progresif demi terwujudnya sub kawasan yang sejahtera, damai, dan kualitas hidup yang baik. Sejalan dengan visi tersebut, IMT-GT memiliki 7 (tujuh) pilar strategis yang digunakannya sebagai alat mencapai visi. Ketujuh pilar strategi tersebut terbagi atas 3 (tiga) *Lead Focus Area* dan 4 (empat) *Enablers*. *Lead Focus Area* antara lain; Pertanian dan Industri Berbasis Agro, Pariwisata, dan Produk Layanan Halal. *Enablers* antara lain; Transportasi dan Konektivitas TIK, Fasilitasi Perdagangan dan Investasi, Lingkungan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga *Lead Focus Area* tersebut tidak dipilih secara sembarangan, namun berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing negara anggota. Ketiganya dipilih dengan harapan dapat menjadi ujung tombak kerja sama dan integrasi IMT-GT. Demi menyokong ketiganya, dirumuskan juga 4 (empat) *Enablers* sebagai pendukung *Lead Focus Area* tersebut.

Latar belakang dan tujuan IMT-GT yang telah dijelaskan tersebut relevan dengan konsep kerja sama *Growth Triangle* atau Segitiga Pertumbuhan. Kesamaan kepentingan ketiga negara, yaitu kemajuan ekonomi, mendorong terbentuknya kerja sama tersebut. Demi kesamaan kepentingan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan progresif, maka model *Growth Triangle* atau Segitiga Pertumbuhan

³⁸ Hakim, L. (2022). *Pariwisata Islam*. Deepublish.

³⁹ IMT - GT Secretariat. (2020). *About IMT - GT*. <https://imtg.org/about-imt-gt/>

dipilih karena dinilai ramping dan efisien sehingga diharapkan dapat efektif mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Tidak hanya karena itu, kesamaan karakteristik wilayah, baik secara geografis atau sosiografis, dan kedekatan letak juga menjadi alasan penggunaan konsep kerja sama *Growth Triangle* atau Segitiga Pertumbuhan menjadi tepat diterapkan dalam IMT-GT.

Secara berkala, IMT-GT merumuskan *Blueprint* setiap 5 (lima) tahun. *Blueprint* tersebut sebagai acuan jangka menengah dalam mencapai *Vision 2036* (jangka Panjang). Pada *Blueprint* periode tahun 2017-2021, IMT-GT berkomitmen untuk saling meningkatkan pariwisata halal.⁴⁰ Isu pariwisata halal menjadi fokus dalam *Blueprint* periode ini, yang mencerminkan gabungan 2 (dua) dari 4 (empat) *Lead Focus Area*, yaitu pariwisata dan produk layanan halal.

Melalui dokumen *Blueprint* periode 2017-2021, ketiga negara memiliki beberapa komitmen dan strategi kerja sama untuk mendukung peningkatan pariwisata halal di sub kawasan. Komitmen dan strategi kerja sama tersebut mencakup 2 (dua) dari 3 (tiga) *Lead Focus Area*, yaitu pariwisata dan produk layanan halal. Kedua *Lead Focus Area* tersebut memiliki turunan berupa target dan strategi capaian yang saling terintegrasi dalam mendukung peningkatan pariwisata halal.

Ketiga negara menargetkan beberapa hal dalam sektor pariwisata. Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021. Beberapa target yang hendak dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke sub kawasan IMT-GT hingga 2% atau 850.000 wisatawan.
2. Rata-rata lama wisatawan tinggal menjadi 4,25 hari.
3. Pengeluaran 1 (satu) orang wisatawan dalam 1 (satu) hari mencapai US \$102,5.
4. Terbukanya lapangan pekerjaan dalam sektor akomodasi sebanyak 350.000 lapangan pekerjaan.
5. Jumlah sertifikasi akomodasi hingga 250 yang sudah tersertifikasi.
6. Rata-rata pemasok lokal dalam sektor akomodasi menjadi 15 pemasok lokal.
7. Pariwisata yang terindeks keselamatan dan keamanan.

Target dalam sektor pariwisata tersebut diupayakan dengan berbagai strategi, antara lain:

1. Pengembangan fasilitas sewa pesawat.
2. Pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.
3. Implementasi standar ASEAN dan destinasi halal dalam pariwisata.
4. Melakukan riset terhadap pasar pariwisata.
5. Merancang strategi pemasaran dan rencana aksi 2 (dua) tahunan.
6. Melakukan *branding* dan promosi.
7. Merancang produk layanan pariwisata (petualangan, lintas batas, dan ekowisata).
8. Membentuk koridor lintas batas sebagai rute pariwisata antar negara.

⁴⁰ B. Y. J. Waterhouse, (2021). *Implementation blueprint 2017-2021*. March, 4-9.

Selanjutnya, ketiga negara juga memiliki target dalam sektor produk layanan halal yang harus dicapai pada tahun 2021, antara lain:

1. Angka standarisasi halal mencapai 100%.
2. Jumlah ilmuwan halal mencapai 30.000 ilmuwan.
3. Nilai ekspor UKM halal mencapai 3.000 ekspor.
4. Jumlah produsen bersertifikat halal mencapai minimal 5%/negara anggota.

Target-target dalam sektor produk layanan halal tersebut diupayakan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Pertukaran informasi halal melalui forum pertemuan.
2. Pembentukan kelompok ahli halal.
3. Kerja sama dengan perguruan tinggi milik negara atau lembaga pendidikan.
4. Akreditasi silabus kurikulum halal.
5. Pertukaran staf ahli.
6. Mempromosikan partisipasi perusahaan lokal besar dan multinasional.
7. Penandatanganan *MoU* perusahaan lokal besar dan multinasional.
8. Pertukaran pengalaman praktik dan pengetahuan.
9. Insentif yang kompetitif bagi perusahaan lokal dan multinasional dalam membantu UMKM halal.
10. Promosi UMKM halal melalui acara promosi perdagangan halal bertaraf internasional (*Indonesia Halal Expo, Malaysia International Halal Showcase, dan Thailand Assembly Halal*).
11. Pelatihan sertifikasi halal bagi UMKM.
12. Sertifikasi halal secara daring (*online*).
13. Pembentukan *database* bahan baku halal.
14. Integrasi informasi melalui platform daring (*online*).

Target dan strategi yang telah disepakati dalam *Blueprint* periode 2017-2021 tentunya berawal dari kesamaan kepentingan dan pandangan yang melahirkan komitmen bersama. Hal tersebut turut mempengaruhi perilaku negara, baik dalam forum IMT-GT sebagai negara anggota atau hubungan bilateral dengan negara anggota IMT-GT lainnya. Misalnya, pada strategi pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan, tentu antar negara anggota IMT-GT, baik trilateral (melalui IMT-GT) atau secara bilateral, melakukan komunikasi dan koordinasi sehingga tercipta pola hubungan kerja sama yang baik. Bahkan termasuk, dapat mempengaruhi kebijakan domestik negara tersebut. Misalnya, Indonesia menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dalam menyediakan penginapan berbasis syariah dan kuliner yang halal, termasuk kerja sama dengan *Association of the Indonesia Tours and Travel* dalam merumuskan paket-paket pariwisata halal dengan destinasi wisata religi.⁴¹

Secara aksi, nilai kerja sama tersebut diimplementasikan melalui forum diskusi IMT-GT. Misalnya seperti penyelenggaraan *IMT-GT Focus Group Discussion* tentang Pengembangan Konektivitas Kuala Lumpur-Banda Aceh-Port

⁴¹ Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32-43

Blair pada Mei 2019 di Hotel Zenith, Putrajaya, Malaysia. Forum tersebut berlangsung atas kerja sama antara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan *Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (CIMT). Pada forum pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh banyak pihak dari Indonesia. Misalnya seperti Direktur Jenderal sekaligus Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Siswo Pramono, LL.M yang menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut. Selain itu, turut hadir dan bicara; Duta Besar Republik Indonesia untuk India Bapak Sidharto Reza Suryodipuro, CEO Malindo Air Bapak Chandran Rama Muthy dan Bapak Fredrik Kasiepo, serta *General Manager Garuda Indonesia* untuk Malaysia.⁴²

Sebelum itu, ketiga negara anggota IMT-GT pada 9 November 2018 telah melakukan kesepakatan bersama dengan lahirnya *Memorandum of Understanding (MoU) on The Expansion of Air Linkages in IMT-GT* atau Nota Kesepahaman tentang Perluasan Hubungan Udara di IMT-GT. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan masing-masing negara anggota IMT-GT. Tujuan *MoU* tersebut utamanya adalah untuk memperluas konektivitas di sub kawasan. Meluasnya konektivitas sub kawasan tersebut diharapkan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya industri pariwisata.

Tidak hanya melalui forum seperti *Focus Group Discussion*, Indonesia juga turut aktif dalam lokakarya yang bertujuan untuk merumuskan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di pesisir dan di laut. Indonesia turut aktif dalam kegiatan serupa, misalnya seperti *Workshop on Maritime and Coastal Sustainable Tourism for Blue Growth in IMT-GT: Managing Over Tourism* yang diselenggarakan di Krabi, Thailand pada 21-24 April 2019. Forum lokakarya tersebut menjadi wadah bagi negara anggota IMT-GT untuk saling bertukar pengalaman untuk praktik terbaik. Lokakarya tersebut tidak hanya dihadiri oleh *Working Group of Tourism* IMT-GT dan perwakilan negara anggota IMT-GT saja, tapi juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi di sub kawasan IMT-GT, akademisi, dan sektor swasta.

Indonesia juga turut aktif dalam pertemuan tingkat tinggi IMT-GT. Misalnya pada *12th IMT-GT Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT ke-12 di Bangkok, Thailand, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo memimpin jalannya pertemuan. Turut hadir, tentunya pemimpin negara anggota seperti Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha. Tidak hanya itu, turut hadir sebagai mitra pembangunan, yaitu Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan Presiden *Asian Development Bank* Takehiko Nakao. Pertemuan tingkat tinggi tersebut salah satunya berisi presentasi laporan perkembangan IMT-GT oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Dr. Darmin Nasution, S.E., M.A. Laporan mencakup beberapa hal seperti implementasi proyek dan perkembangan implementasi 7 (tujuh) pilar strategis IMT-GT. Sebagai upaya meningkatkan pariwisata, IMT-GT menggunakan pendekatan koridor ekonomi konseptual dalam melaksanakan proyek. Proyek yang dimaksud misalnya seperti koridor ekonomi, yang salah satunya menghubungkan 3 (tiga) provinsi di Thailand

⁴² CIMT ADMIN. (2019d). *IMT-GT FOCUS GROUP DISCUSSION ON DEVELOPMENT OF KUALA LUMPUR – BANDA ACEH – PORT BLAIR CONNECTIVITY*. <https://imtgt.org/imt-gt-focus-group-discussion-on-development-of-kuala-lumpur-banda-aceh-port-blair-connectivity/>

Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat) dengan Perak dan Kelantan di Malaysia, serta Sumatera Selatan di Indonesia. Beberapa proyek koridor ekonomi, setidaknya terdapat 5 (lima) hingga 6 (enam) proyek koridor ekonomi IMT-GT yang mendapatkan bantuan teknis dari *Asian Development Bank*.

Tidak hanya itu, peran Indonesia juga ditunjukkan dalam pertemuan tingkat Menteri. Misalnya pada *The 25th IMT-GT Ministerial Meeting* di Krabi, Thailand, para Menteri negara anggota IMT-GT saling bertukar pikiran dan pandangan terkait situasi global yang sedang tren, khususnya percepatan globalisasi dan teknologi serta perubahan iklim. Indonesia yang diwakili oleh Deputy Kerja sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Rizal Affandi Lukman, bersama dengan perwakilan Menteri dari Malaysia dan Thailand menyepakati agar diadakannya pembaharuan dalam implementasi *Blueprint* IMT-GT periode 2017-2021. Pembaharuan tersebut dimaksudkan agar tetap relevan dengan perkembangan global. Tentunya pembaharuan dilakukan pada seluruh aspek dalam 7 (tujuh) pilar strategis IMT-GT.⁴³

Indonesia juga turut aktif dalam peningkatan kerja sama dalam bidang produk dan layanan demi menunjang peningkatan pariwisata halal. Salah satunya melalui forum *The 13th IMT-GT Working Group Halal Products and Services (WGHAPAS) Meeting* dan *The 2nd Meeting on Gap Analysis Halal Standard Task Force* yang diselenggarakan pada 15-16 Agustus 2019 di Bangkok, Thailand. Indonesia bahkan turut aktif dalam perumusan program prioritas *Working Group Halal Products and Services*, misalnya seperti turut dalam *Focus Group Discussion on Priority Programme of WGHAPAS* di *Department of Islamic Development Malaysia* pada 2 Desember 2019. Pada pertemuan tersebut, dibahas terkait potensi kolaborasi negara anggota IMT-GT dalam program dan/atau kegiatan halal. Pada pertemuan tersebut juga disepakati penjajakan skema potensial untuk bermitra dengan inisiatif IMT-GT. Tidak hanya itu, dibentuk juga Satuan Tugas Kolaborasi Industri Halal Strategis.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia tentu menjadi negara yang strategis dan potensial dalam pengembangan pariwisata halal. Hal tersebut membuat beberapa pihak yang berkunjung ke Indonesia untuk belajar dan mengetahui lebih lanjut tentang pariwisata halal. Salah satu kunjungan tersebut adalah saat *Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMIT)* berkunjung ke Jakarta dan Jambi pada 9-13 Desember 2019 dalam rangka program *CIMIT Reaching Out*. Kunjungan CIMIT tersebut dilakukan oleh Direktur CIMIT Bapak Firdaus Dahlan, *Senior Project Coordinator* Ibu Purwaning Putri, dan *Office Manager* Bapak Ahmad Muzaimi. Kunjungan tersebut tidak hanya untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga dengan akademisi dan sektor swasta. Pada tingkat pemerintah pusat, kunjungan kehormatan dilakukan dengan pertemuan bersama Sekretariat Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Bank Pembangunan Islam, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pada tingkat pemerintah daerah, pertemuan dilakukan dengan Gubernur dan Walikota Jambi, Kadin Jambi, dan dilanjutkan dengan kuliah umum di Universitas Jambi.

⁴³ CIMIT ADMIN. (2019e). *KRABI PROVINCE HOSTED THE 25TH IMT-GT MINISTERIAL MEETING*. <https://imtgt.org/krabi-province-hosted-the-25th-imt-gt-ministerial-meeting/>

Kunjungan tersebut bertujuan untuk bertukar pandangan sekaligus membangun platform yang kuat untuk mendukung kegiatan Kelompok Kerja, sekaligus untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pemangku kepentingan setempat.

Kesimpulan

Pariwisata dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah, seperti *safar*, *hijrah* dan lainnya, yang semuanya merujuk pada satu pengertian, yaitu perjalanan. Tujuan dari perjalanannya itu bermacam ragam, dari yang ingin menuntut ilmu, melaksanakan perintah haji dan umrah, dan tujuan lainnya tergantung dari para wisatawan yang melakukan perjalanan. Meskipun tidak ada penjelasan yang detail dan subtil terkait teknis pelaksanaan wisata, namun dalam Islam telah ada prinsip-prinsip umum tentang kegiatan wisata. Di antaranya adalah selama kegiatan wisata tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka pariwisata diperbolehkan. Ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an telah memberikan landasan yang baik mengenai bagaimana seharusnya pariwisata halal dijalankan seperti kebolehan seseorang melakukan perjalanan, menikmati keindahan ciptaan Tuhan, memerhatikan makanan halal dalam aktivitas pariwisata, dan melaksanakan transaksi secara syariah, serta aktivitas pariwisata lainnya yang sesuai dengan syariah.

Pariwisata halal mulai menjadi tren di dunia. Hal tersebut disebabkan tidak hanya karena cepatnya globalisasi saja, namun juga dikarenakan pesatnya perkembangan populasi muslim dunia. Tren pariwisata halal tersebut mendorong negara di dunia untuk mulai menerapkan dan menawarkan pariwisata halal yang berbasis ajaran Islam. Tren tersebut turut membawa peluang ekonomi yang besar bagi negara. Tidak heran jika tiap negara berlomba dalam menerapkan konsep pariwisata halal dalam industri pariwisata masing-masing. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, Indonesia turut berupaya meningkatkan pariwisata halal. Bahkan hingga Indonesia ditempatkan pada posisi pertama bersanding dengan Malaysia sebagai negara dengan pariwisata halal terbaik di dunia versi *Global Muslim Travel Index*. Salah satu yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan pariwisata halal adalah dengan aktif dalam forum kerja sama IMT-GT.

Melalui kerja sama IMT-GT, Indonesia turut aktif dalam berdiplomasi dan mengupayakan meningkatkan pariwisata halal. Salah satu yang dilakukan Indonesia adalah dengan aktif membuka forum dialog dalam kerja sama. Hal tersebut membuat negara anggota IMT-GT dapat saling berdiskusi untuk bertukar informasi dan pengalaman masing-masing dalam sektor pariwisata halal. Nantinya, hasil dialog tersebut dapat menjadi acuan dalam merumuskan kerja sama IMT-GT. Hal tersebut sesuai dengan nilai kerja sama IMT-GT sekaligus sesuai dengan ciri khas diplomasi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip bebas dan aktif, yaitu dialog dan komunikasi dalam berdiplomasi. Secara implementasi, IMT-GT banyak membuka koridor dan akses pariwisata untuk menghubungkan sub kawasan. Sekaligus bertukar pengetahuan dan riset dalam sektor halal, khususnya standarisasi halal.

Daftar Pustaka

- Andriani, D, et al. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015.
- Azzam, M S, M A Abdullah and D B Razak. "Halal Tourism Definition Justification and Scope towards Sustainable Development. ." *International Journal of Business, Economics and Law* (2019): 21-31.
- Mohsin, A, N Ramli and B A Alkhalayfi. "Halal Tourism: Emerging Opportunities." *Tourism Management Perspectives* (2016): 137-143.
- Surur, Fadhil. *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Creswell W., J. (2016). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar.
- Holsti, K. J. (1988). *International Politics: A Framework for Analysis*. Erlangga. <https://doi.org/10.1177/003231876902100207>
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19(December), 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- CIMT ADMIN. (2019d). *IMT-GT FOCUS GROUP DISCUSSION ON DEVELOPMENT OF KUALA LUMPUR – BANDA ACEH – PORT BLAIR CONNECTIVITY*. <https://imtgt.org/imt-gt-focus-group-discussion-on-development-of-kuala-lumpur-banda-aceh-port-blair-connectivity/>
- CIMT ADMIN. (2019e). *KRABI PROVINCE HOSTED THE 25TH IMT-GT MINISTERIAL MEETING*. <https://imtgt.org/krabi-province-hosted-the-25th-imt-gt-ministerial-meeting/>
- Dihni, V. A. (2022). *10 Destinasi Wisata Halal Terbaik di Dunia Versi Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022*.
- IMT-GT Secretariat. (2020). *About IMT-GT*. <https://imtgt.org/about-imt-gt/>
- Jönsson, C., & Hall, M. (2005). Essence of Diplomacy. In *Essence of Diplomacy* (Issue February). <https://doi.org/10.1057/9780230511040>
- Junaidi, J. (2020). Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism. *Management Science Letters*, 10(8), 1755–1762. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.004>
- Kemenag RI. (2019). *Indonesia Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019*.
- Kemenko Perekonomian RI. (2019). *5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019*.
- Nasir, P. E., Jamilah, M., & Halim, A. (2019). *Proceeding of The 1st International Conference on ASEAN (IC-ASEAN) "Towards a Better ASEAN."* <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/70668>
- Nizmi, Y. E. (2020). Memahami Kompleksitas Growth Triangle. *Jurnal Populis*. <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8.701>
- Nizmi, Y. E., & Riau, U. (1989). *Yusnarida Eka Nizmi*. 1143–1158.
- Nye, J. S. (1990). *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. Basic Books.
- Nye, J. S. (2008). Public Diploacy and Soft Power. *Tha Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109.

- Nye, J. S. (2011). *The Future Power. Public Affairs.*
- Phooma, J., Chanin, O., Amphansookko, S., & Somsuk, S. (2022). *Guideline to Promotion Halal Tourism for Muslim into Sustainable Halal Tourism at Songkhla Province.* 2(43).
- RI, K. (2019). *5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019.*
- Robert, Keohane and Martin, L. (2009). The Promise of Institutional Theory
Author (s): Published by : The MIT Press Stable URobert O . Keohane and
Lisa L . Martin RL : <http://www.jstor.org/stable/2539214>. *International Security*, 20(1), 39–51.
- Rudiany, N. P., & Anugrah, P. T. (2020). Potensi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) Sebagai Stumblinh Block terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2(1), 114–141. <https://doi.org/10.25077/fetrian.2.1.114-141.2020>